

**INTERNALISASI NILAI-NILAI KEISLAMAMAN DAN
KEBANGSAAN PADA PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM NEGERI**

Ahmad Bukhari

IAIN Samarinda

akhmadbukhari56@gmail.com

Abstract

Today, the Islamic campus is being hit by complex problems. The complicated problem is the threat of radicalism and terrorism in the name of religion (Islam), whether carried out by individuals or groups and networks affiliated with certain radical organizations such as ISIS, JI, JAT, and NII. Not only Islamic revival movements but also the tarbawi propaganda movement (PKS), Tahriri (HTI), and Salafi (Wahabi) also pose a serious threat to the integrity of the nation and state. For this reason, it is necessary to internalize Islamic values and nationality as Islam rahmatanlilamalamin. The purpose of this research is to know and understand the internalization of Islamic values and nationalities in IAIN Samarinda, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, and UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. This research is a qualitative research with the type of educational research that is the development of Islamic educational thought. This research is a field research and the data sources in this study are primary data sources in the field, specifically: the actors of Islamic universities, chancellors, lecturers, and students. In this study, the methods used in collecting data were observation, interviews, focus group discussions, and documentation. The results of the study in preventing and counteracting various forms of religious radicalization in PTKI with strategic steps: (1) strengthening Islamic insights and nationality through the campus boarding program; (2) deradicalization through strengthening student organizations; (3) selective in accepting students and lecturers; (4) providing moderate, inclusive and humanist Islamic literature, and (5) establish the millennial peace ambassadors on social media.

Key-words: *Internalization, Value, Islam, Nationality*

Abstrak

Saat ini, kampus Islam sedang dilanda masalah yang kompleks. Permasalahan peliknya adalah ancaman radikalisme dan terorisme atas nama agama (Islam), baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dan jaringan yang berafiliasi dengan organisasi radikal tertentu seperti ISIS, JI, JAT, dan NII. Tidak hanya gerakan kebangkitan Islam, gerakan dakwah tarbawi (PKS), Tahriri (HTI), dan Salafi (Wahabi) juga menjadi ancaman serius bagi keutuhan bangsa dan negara. Untuk itu perlu diinternalisasikan nilai-nilai dan kebangsaan Islam sebagai Islam rahmatanlilalamin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami internalisasi nilai-nilai dan kebangsaan Islam di IAIN Samarinda, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pendidikan pengembangan pemikiran pendidikan Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer di lapangan, khususnya: para pelaku perguruan tinggi Islam, rektor, dosen, dan mahasiswa. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, FGD, dan dokumentasi. Hasil kajian dalam mencegah dan menangkal berbagai bentuk radikalisme agama di PTKI dengan langkah-langkah strategis: (1) penguatan wawasan keislaman dan kebangsaan melalui program pesantren; (2) deradikalisme melalui penguatan organisasi kemahasiswaan; (3) selektif dalam menerima mahasiswa dan dosen; (4) menyediakan literatur Islam yang moderat, inklusif dan humanis, dan (5) membentuk duta perdamaian milenial di media sosial.

Kata kunci: internalisasi, nilai, islam, nasional

A. Pendahuluan

Dewasa ini masyarakat dunia, terutama Indonesia khususnya, sedang dilanda permasalahan global yang banyak menguras perhatian dan energi publik. Permasalahan pelik ini yaitu ancaman radikalisme dan terorisme atas nama agama, baik yang dilakukan oleh perorangan (individu yang teradikalisme), ataupun kelompok dan jaringan-jaringan yang berafiliasi dengan organisasi radikal tertentu. Dalam konteks global, dunia internasional dibuat “merinding” dengan aksi-aksi teror dan ekstrem yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok (Islam) garis keras, utamanya *Islamic State of Iraq and Suriah* (NIIS).¹

¹ Masdar Hilmy, “Geneologi dan Pengaruh Ideologi Jihadisme Negara Islam Iraq dan Suriah (NIIS) di Indonesia” dalam *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 4, No. 2, Desember 2014, hlm. 406. Lihat juga Muhammad Najih Arromadloni, “Kritik Pemahaman Hadith Negara Islam Iraq dan Suriah (NIIS)” dalam *Maraji: Jurnal Studi Islam*, Vol. 3, No.1, September 2016, hlm. 108-112.

Berbagai kasus terorisme tak kunjung habis-habisnya membombardir negeri yang plural ini, sejak tumbang rezim orde baru hingga pasca reformasi. Sepanjang tahun 2016, masyarakat kembali dikejutkan oleh serangkaian aksi terorisme. Pada awal tahun, sekelompok pemuda melakukan penyerangan pos polisi di Jalan Thamrin Jakarta Pusat. Pada pertengahan tahun, seorang pemuda berupaya melakukan penyerangan terhadap pendeta dan jamaahnya di gereja Katolik Medan. Di Tangerang, polisi ditusuk oleh seorang pemuda yang mengaku berbaiat dengan ISIS. Kemudian pada penghujung akhir tahun, sekelompok orang melakukan peledakan bom di gereja Oikumene Samarinda. Tidak hanya itu, baru-baru ini kembali terjadi aksi bom bunuh diri yang menyerang tiga gereja di Surabaya. Pelaku bom bunuh diri ini dilakukan oleh satu keluarga pada tanggal 13 Mei 2018 lalu secara bersamaan. Mirisnya, aksi bom bunuh diri ini dilakukan oleh suami istri dan keempat orang anaknya yang masih kecil. Tidak jauh berselang dari kejadian itu, esok harinya kembali lagi terjadi aksi bom bunuh diri yang menyerang Mako Polrestabes Surabaya pada tanggal 14 Mei 2018 yang menimbulkan empat orang personil kepolisian yang bertugas meninggal dunia. Hal ini sangat memilukan dan memprihatinkan, karena pelaku bom bunuh diri ini juga satu keluarga dengan mengendarai sepeda motor dengan membonceng anak dan istrinya. Para pelaku pengeboman itu dilakukan oleh wajah-wajah baru juga dilakukan oleh mantan narapidana terorisme. Hal ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan program deradikalisasi untuk mengatasi berbagai kasus terorisme di Indonesia.²

Realita tersebut menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam baik di sekolah umum maupun sekolah agama mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi lebih bercorak eksklusif, yaitu agama diajarkan dengan cara menafikan hak hidup orang lain, seakan-akan hanya agamanya sendiri yang benar dan mempunyai hak hidup, sementara agama lain salah, tersesat, dan terancam hidupnya, baik dikalangan mayoritas maupun minoritas. Seharusnya pendidikan Islam (pendidikan agama) dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengembangkan moralitas universal yang ada dalam agama-agama sekaligus mengembangkan teologi inklusif dan pluralis.³

Maka dari itu internalisasi nilai-nilai keislaman dan kebangsaan adalah suatu keniscayaan. Upaya internalisasi nilai-nilai keislaman dan kebangsaan di perguruan tinggi Islam dalam rangka membangun kesadaran inklusif-multikultural untuk meminimalisir radikalisme Islam perlu menjadi kajian yang mendalam bagi para ahli dan praktisi pendidikan Islam di Indonesia. Menurut Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Nur Syam, menyatakan bahwa jalan yang terbaik ke depan untuk mengusung deradikalisasi adalah dengan memabangun deradikalisasi agama melalui lembaga pendidikan. Dan untuk itu sangat diperlukan gerakan *review*

² Saefudin Zuhri, *Deradikalisasi Terorisme: Menimbang Perlawanan Muhammadiyah dan Loyalitas Nahdhatul Ulama*, (Jakarta: Daulat Press, 2017), hlm. 16.

³ Nursisto, *Membumikan Pelajaran Agama Islam*, (Yogyakarta: Adicita, 2008), hlm. 138.

kurikulum di berbagai tingkatan pendidikan untuk untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan tindakan anti radikalisme agama.⁴ Dalam forum *Focus Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan di Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), pada 7 April 2011, Nur Syam mengemukakan bahwa melakukan tindakan preventif terhadap gerakan radikalisme akan jauh lebih baik daripada tindakan kuratif lainnya, misalnya memerangi atau menghakimi. Tindakan preventif atau pencegahan tentu menjadi cara yang baik di tengah usaha untuk membersihkan Indonesia dari kasus-kasus terorisme yang terus berkembang.⁵

Mengembangkan konsep deradikalisasi melalui penanaman nilai-nilai keislaman dan kebangsaan di perguruan tinggi tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangannya bukan hanya dari mahasiswa yang sudah menjadi eksponen gerakan Islam radikal, tetapi juga dosen-dosen di perguruan tinggi, baik umum maupun Islam. Sebagaimana diketahui bahwa ideologi radikalisme ini merupakan ideologi yang sangat kuat tertanam di dalam diri seseorang. Ketika seseorang sudah masuk didalamnya, maka akan sangat sulit keluar. Yang mungkin adalah menjadi semakin kuat dan bertambah kuat. Namun, ikhtiar internalisasi nilai-nilai keislaman dan kebangsaan di perguruan tinggi Islam merupakan wujud upaya membangun insan akademika yang religius, humanis, dan pluralis dapat menjadi basis atau kiblat dalam meminimalisir bahkan menangkal berbagai bentuk radikalisme dan terorisme di Indonesia maupun dunia.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tulisan ini bermaksud untuk menghadirkan sebuah tawaran dan solusi preventif dalam meminimalisir dan menangkal radikalisme agama di perguruan tinggi melalui internalisasi nilai-nilai keislaman dan kebangsaan pada IAIN Samarinda, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

B. Kajian Pustaka

Konsep Keislaman dan Kebangsaan

Berbicara tentang keislaman dan kebangsaan pada dasarnya merupakan dua hal yang tak terpisahkan, layaknya dua sisi mata uang logam yang saling terkait satu dengan lainnya. Indonesia merupakan sebuah negara yang besar dan majemuk baik suku, budaya, etnis, maupun agama yang melingkupinya. Meskipun mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam, namun bukan berarti Indonesia menganut hukum Islam *an sich* tanpa melihat keanekaragaman yang khas yang telah lama terbina secara damai yang dipersatukan oleh satu ideologi dan falsafah yakni Pancasila.

Pemahaman mengenai konsep keislaman dan kebangsaan ini tentunya sebagai upaya untuk dapat memahami dan menghayati serta mengamalkan secara utuh

⁴ Nur Syam, "Deradikalisasi Agama Melalui Pendidikan", IAIN Sunan Ampel, dalam website: <http://nursyam.sunan-ampel.ac.id/?p=2566> (29 September 2018).

⁵ Nur Syam, "Deradikalisasi Agama Melalui Pendidikan", IAIN Sunan Ampel, dalam website: <http://nursyam.sunan-ampel.ac.id/?p=2566> (29 September 2018).

mengenai konsep keislaman dan kebangsaan. Keislaman dan kebangsaan tidak bisa dipisahkan, karena bagaikan dua sisi mata uang logam yang saling memiliki keterkaitan erat dalam upaya menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Untuk memahami secara baik dan benar mengenai konsep keislaman dan kebangsaan (nasionalisme) ini dibutuhkan sebuah paradigma dalam memahami konsep keislaman dan kebangsaan yang utuh, bukan setengah-setengah atau sepotong-sepotong, karena paradigma merupakan cara pandang yang mana setiap orang tentunya memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap segala sesuatu termasuk tentang keislaman dan kebangsaan. Maka dari itu, diperlukan penyamaan persepsi mengenai konsep keislaman dan kebangsaan.

Konsep keislaman dan kebangsaan merupakan sebuah konsep yang sejalan dan bukanlah suatu pertentangan, karena negara tanpa agama buta tanpa arah tidak memiliki kompas kehidupan dan agama tanpa sebuah negara akan mengalami kehancuran karena saling mengklaim kebenaran atas keyakinan terhadap agamanya. Keislaman berasal dari kata dasar Islam yang mendapat imbuhan ke- dan akhiran an-, menjadi Keislaman. Islam secara etimologis berasal dari kata kerja *'salima'* yang berarti selamat, damai, dan sejahtera, lalu muncul kata *'salam'* dan *'salamah'*. Dari *'salima'* muncul kata *'aslama'* yang artinya menyelamatkan, mendamaikan, dan mesejahterakan. Kata *'aslama'* juga berarti menyerah, tunduk, dan patuh. Dari kata *'salima'* juga muncul beberapa kata turunan yang lain, diantaranya adalah kata *'salam'* dan *'salamah'* artinya keselamatan, kedamaian, kesejahteraan, dan penghormatan, *'taslim'* artinya penyerahan, penerimaan, dan pengakuan, *'slim'* artinya yang berdamai, damai, *'salam'* artinya kedamaian, ketentraman, dan hormat, *'sullam'* artinya tangga, *'istislam'* artinya ketundukan, penyerahan diri, serta *'muslim'* dan *'muslimah'* artinya orang yang beragama Islam laki-laki atau perempuan.⁶ Keislaman merupakan proses atau tata cara yang mengatur kehidupan umat manusia yang didasarkan pada wahyu yang diturunkan oleh Allah Swt kepada Nabi dan Rasul untuk ditaati dalam rangka memelihara keselamatan, kesejahteraan, dan perdamaian bagi umat manusia sebagaimana yang termaktub dalam kitab suci (Alquran).

Sedangkan kebangsaan atau nasionalisme berasal dari kata *nation* (bangsa). Nasionalisme atau kebangsaan adalah suatu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara atas kesadaran keanggotaan/warga negara yang secara potensial bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran dan kekuatan bangsanya. Menurut John Hutchinson,⁷ nasionalisme merupakan sebuah fenomena budaya daripada fenomena politik karena dia berakar pada entitas dan budaya promodern. Kalaupun nasionalisme bertransformasi menjadi sebuah gerakan politik, hal tersebut bersifat superfisial karena gerakan-gerakan politik nasionalisme pada akhirnya dilandasi oleh motivasi budaya khususnya saat

⁶Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hal. 654-656

⁷ John Hutchinson, *Ethnicity and Modern nations Ethnic and Rasial Studies*, (London: 2000), hal. 34

terjadi krisis identitas budaya. Pada sudut pandang ini, gerakan politik nasionalisme adalah sarana mendapatkan kembali harga diri etnik sebagai modal dasar membangun sebuah negara berdasarkan kesamaan budaya. Semangat kebangsaan akan mengalir rasa kesetiakawanan sosial, semangat rela berkorban dan dapat menumbuhkan jiwa patriotisme. Rasa kesetiakawanan sosial akan mempertebal semangat kebangsaan suatu bangsa.

Dalam konteks paradigma keislaman dan kebangsaan atau nasionalisme di Indonesia, tentunya tidak lepas dari sejarah awal munculnya paham nasionalisme. Paham kebangsaan atau nasionalisme pada mulanya mendapat tantangan keras dari para tokoh, pemimpin Islam, bahkan para tokoh nasional pada umumnya. Penolakan ini didasarkan pada hasil kajian mendalam yang mereka lakukan, yaitu bahwa paham nasionalisme atau kebangsaan itu merupakan produk Barat yang karakternya tidak sejalan dengan ajaran Islam dan nilai-nilai budaya bangsa. Dalam hubungan ini Soekarno mengatakan, bahwa nasionalisme Barat adalah nasionalisme yang mengandung hal-hal negatif, seperti, individualisme, demokrasi liberal yang dilakukan kaum kapitalis, imprealisme, dan chauvanisme, sempit budi, dan saling menyerang.⁸

Namun demikian, paham nasionalisme atau kebangsaan ini pada tahap selanjutnya dapat diterima oleh masyarakat Indonesia setelah diberi makna dan muatan yang berbeda dengan nasionalisme Barat. Nasionalisme yang diterima di Indonesia adalah nasionalisme tauhid, menerima rasa hidupnya sebagai wahyu, dan menjalankan rasa hidupnya itu sebagai suatu bukti, memberikan rasa cinta pada lain bangsa sebagai lebar dan luasnya udara, yang memiliki tempat segenap sesuatu yang perlu untuk hidupnya segala hal yang dalam roh, menjadi “perkakas Tuhan”, hidup dalam roh, nasionalisme yang sama dengan kemanusiaan. Nasionalisme inilah yang selanjutnya dikenal dengan nama Nasionalisme Timur yang digagas oleh Mahatma Ghandi, Rabendranath Tagore, Mustafa Kamil, Jose Rijal, dan Dr. Sun Yat Sen. Nasionalisme yang di terapkan di Indonesia adalah nasionalisme Timur yang disesuaikan dengan nilai-nilai agama dan budaya yang berkembang di Indonesia.

Nasionalisme di Indonesia adalah nasionalisme tauhid (berdasarkan keimanan dan kemanusiaan) serta menolak prinsip-prinsip yang terkandung dalam nasionalisme Barat. Dalam kaitannya dengan nasionalisme Barat ini, Soekarno selanjutnya mengatakan: bahwa nasionalisme Barat yang bersifat serang menyerang dan nasionalisme perdagangan yang memperhitungkan untung rugi, serta nasionalisme yang sempit, pastilah akan hancur dengan sendirinya. Sedangkan nasionalisme tauhid yang lebih bersifat kemanusiaan akan tampil sebagai pemenang.⁹

Tidaklah salah jika memberikan apa yang dimiliki untuk kemajuan dan keagungan ibu pertiwi di mana tinggal “segerombolan” yang berbeda “karakter”

⁸Lihat Badri Yatim, Soekarno, *Islam dan Nasionalisme*, 1999: 76).

⁹ Lihat Badri Yatim, *Soekarno, Islam dan Nasionalisme*, 1999: 85. Lihat pula Azyumardi Azra, *Islam Reformis: Dinamika Intelektual dan Gerakan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), hal. 100.

tersebut. Faktor inilah yang disebut Soekarno sebagai patriotisme untuk melengkapi batasan *nation* dari Bauer dan Renan. Dengan patriotisme, maka seseorang nasionalis akan menyadari keberadaan tempat di mana ia tinggal, di mana “ia kemudian berani membela tanah air yang memberikan kepadanya segala kemungkinan untuk hidup.”¹⁰

Atas dasar itu, maka Soekarno mengajak untuk mencintai “ibu Indonesia” atau cinta tanah air yang penuh dengan keindahan dan kecantikan alamnya dan kemakmuran yang telah memberikan hidup serta melahirkan tokoh-tokoh besar.¹¹ Karena kebesaran dan keagungan “ibu Indonesia” itulah, ia berani mengajak semua manusia Indonesia untuk memperhamba diri kepada tanah air (membela tanah air). Sebagaimana ungkapan syair Arab (mahfudzhat) yaitu *hubbul wathan minal iman* (cinta tanah air sebagian daripada iman).

Namun, seiring berjalannya waktu, nilai-nilai keislaman dan kebangsaan yang di *brackdown* dalam Pancasila kini telah kehilangan spiritnya, apalagi dengan derasnya arus globalisasi di era milenial sekarang ini telah mengikis nilai-nilai keislaman dan kebangsaan para pemuda generasi penerus bangsa terutama kalangan mahasiswa di berbagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

Maka dari itu, perlunya internalisasi nilai-nilai keislaman dan kebangsaan di perguruan tinggi Islam sangat penting peranannya mengingat berbagai bentuk radikalisme agama kini telah masuk di perguruan tinggi Islam. Untuk itu, perlu memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa akan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan seperti membumikan spirit Islam *rahmantan lil ‘alamin* yaitu memiliki paham *tawasuth* (moderat), *ta’adul* (bersikap adil), *tasamuh* (toleran), dan *tawazun* (harmoni). Dengan adanya keempat nilai-nilai keislaman dan kebangsaan ini maka ukhuwah Islamiyah, insaniyah, wathaniyah, dan alawiyah akan berjalan secara harmonis antar umat beragama dan berbudaya di nusantara.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka dapat di tarik benang merahnya bahwa terdapat relasi keislaman dan kebangsaan. Karena terbangun bangsa Indonesia merupakan peran penting dari para ulama dan tokoh-tokoh Islam dalam memperjuangkan merdekanya bangsa Indonesia. Islam dengan konsep agama yang membawa perdamaian tidak akan berkembang dengan pesat peradabannya jika tidak masuk dalam sebuah negara, begitu juga sebaliknya negara tidak akan adil, makmur, damai dan sejahtera tanpa adanya agama yang melingkupinya. Oleh karena itu, agama (Islam) tidak bisa dipisahkan dari negara, begitu pula sebaliknya.

Relevansi Islam dan Pancasila

Semua masyarakat Indonesia mengakui secara sadar bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila telah terbukti menjadi pemersatu bangsa yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, etnis, dan golongan. Terlepas dari itu semua, dalam tinjauan historis, sehari setelah Indonesia merdeka, terjadi perdebatan serius tentang dasar negara Indonesia merdeka. Perdebatan panjang di BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang terjadi sebelum kemerdekaan

¹⁰ Badri Yatim, *Soekarno, Islam dan Nasionalisme...*, hal.62.

¹¹Deliar Noer, *Pengantar Kepemikiran Politik*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hal. 164.

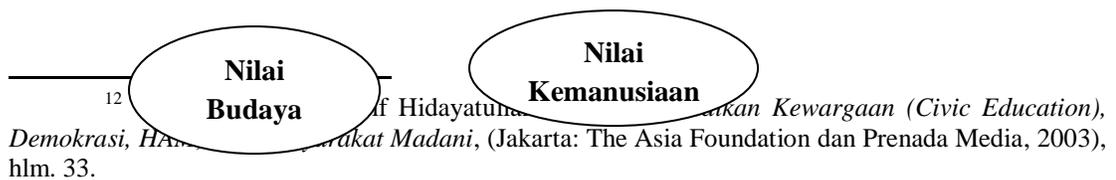
tentang dasar negara antar kelompok Islam yang menghendaki Islam sebagai dasar negara dan golongan nasionalis. Perdebatan tersebut pada akhirnya menghasilkan sebuah kompromi yakni BPUPKI “bersepakat” menghasilkan sebuah *preamble*. Dalam *preamble* tersebut terdapat kalimat sebagai berikut: “...kemerdekaan Indonesia dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya...”. Selain itu, mereka juga “menerima” Islam sebagai agama negara juga bahwa Presiden Republik Indonesia harus seorang yang berasal dari umat Islam. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945, kesepakatan tersebut ditandatangani bertepatan dengan Hari Jadi Kota Jakarta, sehingga dokumen tersebut dikenal dengan Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*).¹²

Akan tetapi, sehari setelah kemerdekaan, kesepakatan itu mulai dipersoalkan, bahkan sebagai masyarakat di wilayah Timur Indonesia menyatakan tidak bersedia bergabung dengan Republik Indonesia, kecuali dengan beberapa unsur (tujuh kata) dalam Piagam Jakarta dihapuskan. Akhirnya usul perubahan itu diterima dan ditetapkanlah Undang-Undang 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dengan sendirinya 7 kata dalam Piagam Jakarta tidak tercantum dalam Konstitusi Negara. Hilangnya 7 kata tersebut oleh umat Islam dinilai sebagai sebuah pengorbanan besar umat Islam demi terwujudnya persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia. Sejak saat itu, Dasar Negara Republik Indonesia adalah Pancasila dengan lima sila, yaitu: (1) Ketuhanan yang Maha Esa; (2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; (5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.¹³

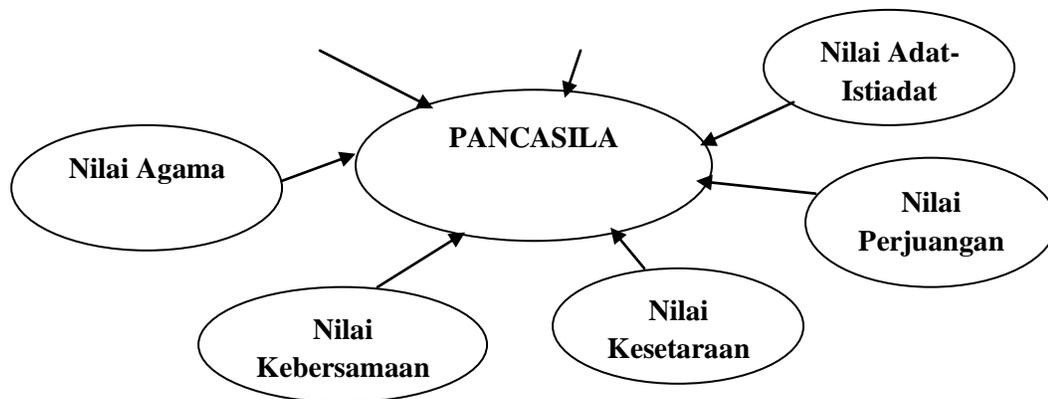
Sila-sila tersebut disusun berdasarkan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat Indonesia, ada nilai-nilai agama (Islam), budaya, kemanusiaan, adat istiadat, kebersamaan, kesetaraan, dan lain sebagainya. Nilai-nilai tersebut mengkristal dalam rumusan Pancasila sebagai perwujudan filsafat kemanusiaan yang mencerminkan hubungan manusia dengan Tuhan (*hablum minallah*), hubungan manusia dengan manusia (*hablum minannas*), dan manusia dengan lingkungan alam sekitarnya (*hablum minal 'alam*). Rumusan Pancasila ini merupakan suatu pandangan hidup yang telah diyakini bangsa Indonesia sebagai suatu kebenaran yang hingga kini dijadikan falsafah hidup bangsa.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Rumusan Pancasila



¹³ TIM ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pendidikan Kewargaan...*, hlm. 34.



Sebagai falsafah hidup bangsa dan ideologi nasional, Pancasila merupakan gagasan dan cita-cita bangsa Indonesia yang harus diwujudkan dalam bentuk pembangunan yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai ideologi nasional juga, Pancasila memerlukan suatu norma (aturan) yang mampu mengatur, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam pengamalan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagai falsafah hidup bangsa, Pancasila mencerminkan konsepsi yang menyeluruh dengan menempatkan harkat dan martabat manusia sebagai faktor sentral kedudukannya yang fungsional terhadap segala sesuatu yang ada. Hal ini berarti wawasan dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara kultural diinginkan tertanam dalam hati, kepribadian, dan mampu mewarnai kebiasaan dan pola perilaku serta kegiatan-kegiatan baik yang dilakukan oleh perorangan maupun oleh kelompok atau secara bersama-sama ditengah masyarakat.¹⁴

Pemaknaan tunggal terhadap Pancasila dengan tafsiran-tafsiran resminya telah membawa Pancasila sebagai suatu agama baru yang tertutup bagi diskusi umum. Seharusnya Pancasila harus dijadikan sebagai diskusi umum (*public discourse*) sehingga terjadi pemaknaan nilai-nilai Pancasila di dalam habitus-habitus dari kebhinekaan bangsa Indonesia.¹⁵

Pancasila terbukti sebagai *common platform* ideologis bangsa Indonesia yang paling mungkin diterapkan untuk hari ini, besok, dan di masa yang akan datang. Pancasila telah memuat nilai-nilai luhur bangsa yang telah mampu menjangkau lintas suku, agama, ras, golongan, dan lain sebagainya yang ada di Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila dengan nilai-nilai luhurnya sangat relevan bagi kondisi bangsa Indonesia yang majemuk (plural) ini.

¹⁴ Sholehuddin, *Damai Beragama Damai Bernegara*, (Tangerang Selatan: CV. Mutiara Barokah Multigrafika, 2018), hlm. 153.

¹⁵ H.A.R Tilaar, *Mengindonesia: Entitas dan Identitas Bangsa Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 185.

Sebagaimana yang dikemukakan di atas, Pancasila merupakan hasil rumusan dari berbagai nilai-nilai luhur bangsa yaitu nilai agama, budaya, perjuangan, adat istiadat, kesetaraan, kebersamaan, dan kemanusiaan yang diambil dari berbagai daerah di nusantara ini, maka mengamalkan Pancasila berarti mengaktualisasikan nilai-nilai luhur bangsa tersebut. Secara lebih jelas tertuang dalam sila-sila yang ada dalam Pancasila. Pancasila memiliki relevansi dan korelasi yang sangat erat dengan berbagai nilai-nilai luhur, salah satunya adalah nilai-nilai agama (Islam). Perumusan Pancasila juga tidak lepas dari nilai-nilai agama Islam, bahkan setiap sila yang terkandung dalam Pancasila memuat nilai-nilai keislaman yang begitu kuat dan mengakar dengan berpedoman kepada Al-Qur'an. Berikut merupakan perumusan Pancasila yang dieksplorasi berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an:

Sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini mengandung filosofi bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Tuhan (beriman dan bertakwa kepada Allah) bukan bangsa yang anti Tuhan (atheisme). Selain itu juga, sila ini mencerminkan hubungan manusia dengan Tuhannya (*hablumminallah*). Bangsa Indonesia adalah bangsa yang mengakui keesaan Tuhan dengan segala kuasa-Nya. Hal ini disandarkan kepada firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surah Al-Ikhlâs ayat 1-4:

Terjemahannya: *“Katakanlah: “Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Illah yang bergantung kepada-Nya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan. Dan tiada seorang pun yang setara dengan Dia”.*

Ayat di atas memiliki relevansi yang erat dengan Pancasila. Pancasila dirumuskan dengan konsep Ketuhanan yang Maha Esa memiliki arti bahwa manusia mengakui dan meyakini bertuhan satu yaitu Allah Swt. Esensi ketuhanan tidak bisa disandingkan dengan bentuk lainnya. Hanya kepada Allah-lah tempat menyembah dan hanya kepada-Nya-lah tempat meminta pertolongan. Sebagai seorang hamba Tuhan (Allah) sudah seyogyanya kita beribadah kepada-Nya dan mengerjakan perintah-Nya serta menjauhi larangan-Nya. Tentunya nilai-nilai Pancasila pada sila pertama ini dapat diinternalisasikan dan diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk individu, masyarakat, agama, dan bangsa. Sila pertama ini menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi merupakan pondasi dari Pancasila itu sendiri.

Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Sila ini mengajak masyarakat atau warga negara Indonesia di mana pun berada untuk mengakui dan memperlakukan setiap orang sebagai sesama manusia, yang memiliki martabat mulia, dan hak-hak serta kewajiban asasi. Bukankah Allah Swt telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Karena itu, tidak patut bagi kita untuk memperlakukan manusia dengan seenaknya. Setiap manusia harus diperlakukan dengan baik, yakni dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Dengan kata lain sikap untuk menjunjung tinggi martabat dan hak-hak asasinya.

Pada sila kedua ini, nilai kemanusiaan dan nilai kesetaraan diimplementasikan dengan menunjukkan tidak adanya perlakuan diskriminatif walaupun dari suku, ras dan golongan yang berbeda. Dalam hal ini, manusia harus dilihat dari sisi

kemanusiaannya bukan dari simbol-simbol yang dimilikinya, dari suku-sukunya, dari warna kulit dan lain sebagainya. Dengan kondisi masyarakat yang pluralistik, bangsa Indonesia “rentan” dengan sikap-sikap diskriminatif atas golongan-golongan tertentu. Akan tetapi dengan sila ini, bangsa Indonesia telah mengakui dan menghormati manusia bukan karena asal sukunya, atau asal agamanya, dan lain sebagainya melainkan menghormati manusia karena kemanusiaannya itu.¹⁶ Firman Allah Swt dalam Al-Qur’an surah Al-Hujurat ayat 11

Terjemahannya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman. dan barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.”*

Sila ini juga menuntut masyarakat Indonesia untuk memperlakukan setiap manusia secara adil dan beradab. Perlakuan secara adil dan beradab juga merupakan hak setiap warga negara, dan memperlakukan setiap manusia secara adil dan beradab adalah kewajiban setiap warga negara. Jangan sampai kebencian kita terhadap orang lain menjadikan kita berbuat tidak adil dan aniaya kepada mereka. Secara lebih jauh, kita tidak hanya bisa menuntut haknya semata tanpa menjalankan kewajiban terlebih dahulu, bahkan kewajiban yang utama justru menghormati hak-hak orang lain.

Terjadinya banyak kekacauan di negeri ini salah satunya dikarenakan banyak orang yang hanya menuntut haknya saja agar dipenuhi tanpa menjalankan kewajiban yang ada pada dirinya. Orang tersebut tidak sadar bahwa apa yang dilakukannya adalah tidak adil bagi dirinya dan bagi orang lain. Keributan dan kekacauan juga bisa ditimbulkan oleh pendistribusian keadilan yang dilakukan tidak dengan cara yang baik. Setiap orang harus diperlakukan secara adil, tapi harus dengan cara yang baik, tidak seenaknya. Banyak hal yang bisa dilakukan dalam mewujudkan atau mengaktualisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ini, misalnya menghormati orang yang lebih tua, dan menyanyangi orang yang lebih muda, berani membela kebenaran, banyak berbuat untuk kemanusiaan, bersikap adil, memperlakukan orang dengan sopan, dan lain sebagainya.

Sila Ketiga, Persatuan Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harga mati bagi bangsa Indonesia. Dalam kondisi apapun keutuhan NKRI harus tetap dijaga. Sila ini menumbuhkan sikap masyarakat untuk mencitai tanah air, bangsa, dan negara Indonesia, ikut memperjuangkan kepentingan-kepentingan nasional dan loyal terhadap sesama warga negara, mendahulukan kepentingan-kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan demi terwujudnya persatuan. Sila ini mengandung nilai persatuan, nilai perjuangan, dan semangat nasionalisme (ke-Indonesia-an) bukan semangat kedaerahan seperti yang banyak terjadi akhir-akhir ini. Semangat primordialisme atau kedaerahan harus

¹⁶Sholehuddin, *Damai Bernegara Damai Beragama...*, hlm.162.

diganti dengan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Kita hidup di bumi pertiwi ini bukan atas nama daerah atau suku masing-masing melainkan atas nama Indonesia.¹⁷

Hal ini sebagaimana Allah telah firmankan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 yang terjemahannya: *"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."*

Ayat ini memberikan satu landasan tindakan kemasyarakatan umat Islam, bahwa dalam pergaulan kemasyarakatan dan hubungan antarbangsa, umat Islam tidak mungkin melepaskan tanggung jawabnya, secara khusus di dalam membangun kerja sama, saling mengerti dan menghargai satu sama lain.¹⁸

Selain itu, sila ketiga ini juga mencerminkan ide *ukhuwah insaniyah* (persaudaraan manusia),¹⁹ dan *ukhuwah Islamiyah* bagi sesama umat Muslim. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 103-105

Terjemahannya: *"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka Itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat"*.

Persatuan akan terwujud sikap toleransi yang tinggi antar sesama, sikap saling menghargai. Persatuan yang harus digaribawahi adalah sama halnya dengan pluralitas. Dalam hal ini pluralitas berdasarkan apa yang dituntut oleh kemaslahatan rakyat, agar tercapai kesatuan dalam tujuan dan sasaran. Tujuan penting tersebut adalah agar umat seluruhnya berdiri dalam kesatuan barisan di hadapan musuh-musuh.²⁰

Sila Keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Sila ini menunjukkan sistem kenegaraan bangsa Indonesia. Sila ini juga mengajak masyarakat untuk bersikap peka dan ikut

¹⁷Sholehuddin, *Damai Bernegara Damai Beragama...*, hlm. 166.

¹⁸ Toto Tasmara, *Menuju Muslim Kaffah, Menggali Potensi Diri*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 389.

¹⁹ Erni Budiwanti, *Islam Sasak*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 72.

²⁰ Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam...*, hlm. 194.

serta dalam kehidupan politik serta pemerintahan negara, setidaknya secara tidak langsung, bersama dengan sesama warga atas dasar persamaan tanggung jawab sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Sila ini mengandung nilai-nilai kemasyarakatan, permusyawaratan, dan saling menghormati orang lain untuk mengabdikan kepada bangsa berdasarkan kedudukannya dan profesinya masing-masing. Kita memiliki lembaga tertinggi negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan keanggotaannya terdiri dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Lembaga ini merupakan wujud perwakilan dari seluruh warga negara Indonesia.²¹

Dalam sila ini juga terkandung nilai bahwa dalam melakukan musyawarah untuk mufakat, kita harus melakukan dengan kepala jernih, bebas kepentingan individu dan kelompok, menggunakan akal sehat, dan tidak mudah terprovokasi oleh oknum-oknum tertentu. Sejalan dengan hal tersebut, Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 38

Terjemahannya: *"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka."*

Kemudian ayat di atas juga diperkuat dengan ayat lain yaitu surah Al-Mujadilah ayat 11 yang terjemahannya: *"Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."*

Kedua ayat ini memiliki makna alternatif oleh para mufassir adalah bahwa Rasulullah Saw memerintahkan untuk melakukan musyawarah bukan karena beliau membutuhkan pendapat mereka, melainkan karena ketika beliau menanyakan pendapat mereka, setiap orang akan berusaha berpikir keras untuk merumuskan pendapat yang terbaik dalam pandangan mereka, sehingga sesuai dengan suara hati masing-masing.²²

Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila ini menunjukkan tidak ada perilaku yang diskriminatif bagi seluruh warga negara Indonesia. Keadilan harus ditegakkan kepada seluruh warga negara tanpa memandang suku, ras, etnis, agama, dan segala macam perbedaan lainnya.²³

Sila ini juga mengajak masyarakat untuk aktif dalam memberikan sumbangan yang wajar sesuai dengan kemampuan dan kedudukannya masing-masing kepada negara demi terwujudnya kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir dan batin

²¹ Sholehuddin, *Damai Bernegara Damai Beragama...*, hlm. 168.

²² Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 274

²³ Sholehuddin, *Damai Bernegara Damai Beragama...*, hlm. 170.

yang dapat dirasakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Sila ini mengandung nilai keadilan dan kebersamaan yang mencerminkan keluhuran budaya bangsa. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah An-Nahl ayat 71 yang terjemahannya: *“Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?.*

Terjemahannya: *“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*(QS. Ali Imran: 180)

Ayat di atas telah secara jelas memerintahkan kepada kita untuk berbagi kepada sesama. Apa yang kita miliki pada hakikatnya adalah milik Allah Swt yang diamankan kepada kita untuk berbagi kepada orang lain, karena sebagian dari yang kita miliki tersebut terdapat hak orang lain. Sila kelima ini menunjukkan semangat berbagi kepada seluruh bangsa Indonesia. Jangan sampai kesejahteraan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja, kesejahteraan harus dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.²⁴

Berdasarkan sila-sila di atas, maka bangsa Indonesia berdiri dan berkembang berdasarkan Pancasila tersebut. Pancasila menjadi pondasi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara dalam segala aspeknya, jadi tidak hanya persoalan kepemimpinan/pemerintahan, melainkan juga pada persoalan hukum, keadilan, ekonomi, budaya, kesejahteraan, dan lain sebagainya.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menggambarkan subyek penelitian dengan menggunakan paradigma fenomenologis yang bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Penelitian kualitatif menurut Kriek dan Miller dalam Maleong merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya yang berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya.²⁵ Sejalan dengan definisi tersebut, Bogdan dan Biklen menjelaskan dalam studi kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan

²⁴Sholehuddin, *Damai Bernegara Damai Beragama...*, hlm.172-173.

²⁵ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), Cet. 7, hlm. 4

dan perilaku-perilaku orang-orang yang dapat diamati. Oleh sebab itu, studi kualitatif disebut dengan istilah *inquiry* alamiah (*naturalistic*).²⁶

Jenis penelitian ini adalah multi situs. Multi situs merupakan suatu rancangan penelitian kualitatif yang melibatkan beberapa situs, tempat, dan subjek penelitian. Subjek penelitian tersebut diasumsikan memiliki karakteristik yang sama. Sebagaimana dikemukakan oleh Bogdan dan Biklen,²⁷ studi multi situs merupakan salah satu bentuk penelitian kualitatif yang memang dapat digunakan terutama untuk mengembangkan teori yang diangkat dari beberapa latar penelitian yang serupa, sehingga dapat dihasilkan teori yang dapat ditransfer ke situasi yang lebih luas dan lebih umum cakupannya. Penelitian multi situs menggunakan logika yang berlainan dengan pendekatan studi multi kasus, karena arahnya lebih banyak untuk mengembangkan teori, kecenderungan memiliki banyak situs dari pada dua atau tiga. Menurut Bogdan dan Biklen, pendekatan situs tunggal dan multi situs memiliki dua jenis studi, yaitu induksi analitis modifikasi dan metode komparatif konstan.²⁸ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis komparatif konstan dengan melihat kecenderungan atau kesamaan karakteristik dari beberapa lokasi penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh melalui multi situs, tidak dimaksudkan untuk generalisasi. Namun, karena informasi yang diperoleh cukup lengkap, maka data yang diperoleh dapat menjadi representasi dari peristiwa-peristiwa atau kenyataan-kenyataan yang serupa.

Penelitian ini dilaksanakan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang dilakukan di tiga perguruan tinggi yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Lokasi penelitian ini memiliki karakteristik dan kekhasan yang serupa karena berasal dari instansi yang sama yaitu perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Agama, meski demikian tentu setiap perguruan tinggi tentunya memiliki ciri khas yang memiliki corak yang berbeda sebagai satu kesatuan dalam menciptakan grand desain Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Sumber data dalam penelitian ini atau informan adalah rektor, dosen, tenaga kependidikan, karyawan, dan mahasiswa. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah wawancara mendalam (*dept interview*), dokumentasi (*documentation*), dan observasi (*observation*).

²⁶ Bogdan, Robert, dan Biklen, SK, *Qualitative for Education : an Instruction to Theory and Methods*, (Boston: Allyn and Bacon, Inc, 1982), hlm. 27.

²⁷ Robert Bogdan & Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research for Education: and Introduction to Theory and Methods*, (Boston: Allyn & Bacon Inc, 1982), hlm. 65.

²⁸ Robert Bogdan & Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research for Education: and Introduction to Theory and Methods...*, hlm. 66.

D. Pembahasan

1. Penguatan Wawasan Keislaman dan Kebangsaan

Penguatan wawasan keislaman dan kebangsaan khususnya di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), dapat membentuk mahasiswa/mahasiswi yang tidak hanya cerdas dalam pemahaman ilmu agama yang dapat diimplementasikan melalui ritual ibadah *mahdah* maupun ibadah sosial, serta mampu menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila yang merupakan ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila merupakan norma atau aturan hidup masyarakat Indonesia. Tentunya Pancasila lahir karena adanya pengintegrasian antara nilai-nilai agama, budaya, kemanusiaan, adat istiadat, perjuangan (patriotism), kebersamaan, dan kesetaraan.

Penguatan wawasan keislaman dan kebangsaan dengan lebih menekankan pada penanaman nilai-nilai Islam *rahmatan lil 'alamin* yang melahirkan paham *tawasuth* (moderat), *ta'adul* (bersikap adil), *tasamuh* (toleran), dan *tawazun* (harmoni) dalam proses pembelajaran di kampus amatlah penting guna sebagai pondasi utama bagi mahasiswa/mahasiswi dalam menghadapi maraknya pemahaman radikal yang kini sudah *goes to campus* dengan berbagai konsep dan *soft strategy*-nya yang kini mulai tumbuh subur di berbagai kampus Islam di Indonesia dengan ciri-ciri simbolik yang mereka tampilkan seperti penggunaan cadar (*niqob*) bagi muslimah (*akhwat*), dan celana cingkrak (*isbal*) bagi muslim (*ikhwan*), serta penggunaan janggut dan *style* pakaian yang serba hitam tertutup (gamis) yang religius yang kini semakin viral dan banyak diminati oleh kalangan milenial.

Menurut RK, Radikalisme secara ideologi memang sudah masuk dan merambah sampai kepada mahasiswi seperti kami khususnya bagi mahasiswi yang memiliki kedangkalan wawasan ilmu keislaman dan kebangsaan. Bagi mahasiswi seperti kami yang mayoritas berasal dari SMA umum yang begitu kurang memahami berbagai ilmu keislaman memang dapat menjadi lahan subur sasaran *harakah tarbiyah* yang sudah dikemas sedemikian rupa oleh para mentoring ketika kami masih aktif di kegiatan Rohani Islam (Rohis) ketika di SMA, kemudian ketika masuk di Perguruan Tinggi Islam kami juga ditawarkan dengan konsep Islam yang sesungguhnya (purifikasi), sehingga ketika ada kajian keislaman di kampus kami langsung tertarik untuk mengikutinya agar dapat *hijrah* menjadi pribadi yang lebih baik lagi tanpa adanya upaya *critical thinking* (berpikir kritis) dengan melihat dari sudut pandang lain yaitu wawasan kebangsaan sebagaimana yang terdapat dalam ideologi Pancasila sebagai falsafah negara yang sudah menjadi harga mati bagi bangsa Indonesia. Salah satu upaya menangkal ideologi radikal tersebut adalah dengan melakukan penguatan wawasan keislaman dan kebangsaan di kampus Islam

sehingga tidak mudah terpengaruh dan terombang ambing oleh berbagai bentuk radikalisasi agama”.²⁹

Sedangkan menurut PR, radikalisasi agama memang menjadi momok yang mengkhawatirkan terutama di dunia kampus. Karena sekarang kampus memang sudah menjadi wadah ideologisasi keagamaan. Karena saat ini banyak organisasi Islam radikal menyasar mahasiswa/mahasiswi kampus Islam untuk melakukan pengkaderan dan penyemaian benih-benih ideologinya. Biasanya mereka memang dalam menyemaikan ideologinya secara *soft* dan sembunyi-sembunyi yang bermula dari majid kampus. Dari sinilah upaya penanaman pertama yang mereka lakukan dengan cara berdialog permasalahan keagamaan dan membenturkan dengan kepanikan moral (*moral panic*) dewasa ini mendera anak-anak muda seperti degradasi moral, seks bebas, narkoba dan lain sebagainya, sehingga agama menjadi satu-satunya solusi. Solusi itu mereka kemas dengan sering mengikuti kajian-kajian keislaman untuk dapat mempertebal iman yang sering mereka lakukan dari masjid sebagai basisnya. Hal ini secara konsep keagamaan memang benar dan tujuannya baik, tapi jangan lupa bahwa mereka selain mengajak untuk hijrah juga ada muatan romantisme politik keagamaan yang menjadi tujuan final mereka yaitu mendirikan negara Islam (*dawlah Islamiyah*) dan merapkan konsep *khilafah Islamiyah* dan mengganti ideologi Pancasila. Untuk itu, penguatan keislaman dan kebangsaan dari kampus melalui beragam mata kuliah penting perannya untuk dapat menangkal berbagai bentuk modus radikalisme agama yang kini marak di dunia kampus”.³⁰

Kemudian menurut ZK, radikalisme atas nama agama tidak bisa dihindarkan di dunia kampus, terutama di kampus Islam. Karena di kampus memang tempat suburnya sebuah ideologi agama. Terkait gerakan radikalisme yang sering dilancarkan oleh organisasi Islam seperti PMII, HMI, HTI, IMM, KAMMI, IM, dan berbagai organisasi Islam lainnya tentu melakukan proses pengkaderan dan indoktrinasi keagamaan. Nah, tentu organisasi Islam ini sah-sah saja apalagi di kampus Islam, namun organisasi ini bisa berbahaya ketika ada statmen ingin mendirikan *khilafah Islamiyah* dan mengganti ideologi Pancasila. Simbol-simbol radikalisme yang banyak muncul di kampus-kampus Islam yaitu maraknya romantisme budaya *niqob* (cadar), bahkan mereka telah memiliki komunitas *niqobis* di kampus Islam, sehingga hal ini menjadi berbahaya ketika mereka telah memiliki massa yang besar. Sehingga itulah awal mula munculnya pelarangan cadar yang sempat fenomenal kemarin meskipun pelarangan itu telah dicabut karena berbagai kebijakan, karena romantisme cadar (*niqob*) ini merupakan bibit-bibit radikalisme yang terjaring dalam organisasi Islam seperti HTI dan IM, KAMMI yang sering melakukan kajian-kajian keislaman seperti tarbiyah di masjid-masjid kampus yang sering menggiring opini mahasiswa/mahasiswi dengan mengkritik kebijakan

²⁹ Wawancara bersama informan berinisial RK, seorang Mahasiswi IAIN Samarinda, pada tanggal 22 April 2019.

³⁰ Wawancara bersama informan berinisial PR, seorang Mahasiswa UIN Maliki Malang pada tanggal 26 April 2019.

pemerintah yang tidak sesuai dengan Islam, serta membahas berbagai persoalan masyarakat seperti kerusakan moral, seks bebas, narkoba, tidak optimalnya pengelolaan zakat (bahkan lebih cenderung dikorupsi), sehingga masyarakat semakin terpuruk, menderita dan tidak sejahtera. Sehingga solusi yang mereka (para mentor HTI, IM dan lainnya) tawarkan adalah dengan diberlakukannya perda syariah dan khilafah Islamiyah agar keadilan bisa ditegakkan di Indonesia. Ketika semangat keislaman ini sudah berhasil mereka bangkitkan, maka hal ini sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Untuk itu, penguatan wawasan keislaman dan kebangsaan di dunia kampus dalam setiap perkuliahan sangat penting agar tercipta pemahaman yang lebih komprehensif, moderat, dan humanis, pungkasnya.³¹

2. *Deradikalisasi Berbasis Penguatan Organisasi*

Organisasi kemahasiswaan *mainstream* (PMII dan HMI) dan IMM—khususnya untuk kampus Muhammadiyah sebagai organisasi Islam *mainstream* di Indonesia ini bergandengan tangan untuk dapat bersatu dalam menolak berbagai bentuk organisasi kemahasiswaan yang berpaham radikalisme yang bertujuan ingin membenturkan agama dan bangsa dengan label mengatasnamakan Islam sebagai organisasi yang ideal dalam merespon berbagai problema dan tantangan zaman. Sehingga organisasi merekalah yang paling benar sebagai solusi akan permasalahan yang kini mendera bangsa ini. Hal inilah yang kemudian memberikan celah-celah yang kini menjadi peluang bagi kelompok-kelompok radikalisme untuk menanamkan paham-paham keagamaannya.

AB mengatakan bahwa kampus merupakan tempat di mana lahirnya manusia-manusia yang berparadigma kritis, intelek, terbuka, aktifis, provokatif, dan belum stabil dalam berpikir yang terkadang mudah terprovokasi jika tidak memiliki imunitas yang kuat terhadap berbagai serangan virus-virus doktrinasi dari luar. Dengan tidak adanya imunitas yang kuat tadi maka mahasiswa akan mudah sekali terjangkiti oleh virus-virus pemikiran yang agak keliru dalam memahami Islam terutama Islam Nusantara. Oleh karena itu, mahasiswa sebagai bagian dari civitas akademika hendaknya melakukan berbagai tindakan pencegahan atas berbagai indoktrinasi yang kini sedang menyerang mahasiswa. Kampus selain tempat manusia-manusia kritis dan intelek juga merupakan lahan subur untuk dapat menanamkan benih-benih radikalisme. Melalui organisasi kampus yang merupakan organisasi yang dibentuk oleh insan kampus maka kami selaku mahasiswa yang berorganisasi baik di lingkungan institut (SEMA/DEMA) maupun HMJ-HM-PS atau organisasi internal lainnya akan melakukan berbagai penguatan-penguatan organisasi internal kampus

³¹ Wawancara bersama informan berinisial ZK, seorang Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 25 April 2019.

seperti melakukan perekrutan yang lebih selektif, efektif, efisien dan kompetitif, agar dapat tercipta kerja sama yang baik dan solid dalam mencegah berbagai gempuran radikalisme.³²

Sedangkan menurut FT, penguatan organisasi kemahasiswaan terutama intra kampus maupun ekstra kampus tentunya harus dapat menjadikan kampus sebagai sebuah wadah yang dapat membangun peradaban Islam yang lebih moderat, inklusif dan humanis serta kompetitif. Organisasi kemahasiswaan di kampus seyogyanya mampu menjadi solusi deradikalisasi dari berbagai kelompok organisasi radikal yang kini sudah masuk ke berbagai perguruan tinggi Islam di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri setiap organisasi selain sebagai media perkumpulan sebuah komunitas pergerakan dakwah juga terdapat visi dan misi serta tujuan akhir yang ingin dicapai. Tentunya, organisasi kampus tidak lepas dari visi misi lembaga atau institusi sehingga dengan adanya integrasi visi dan misi yang sama akan lebih mudah mempercepat tercapainya tujuan bersama. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak bermunculan organisasi ekstra kampus (di luar organisasi PMII, IMM dan HMI) yang bermunculan di berbagai kampus Islam, yaitu HTI, KAMMI, dan IM yang kini sudah mulai masuk dan melakukan indoktrinasi agama yang dikenal dengan konsep Dakwah Tarbiyah, Lembaga Dakwah Kampus, Pusat Studi Islam Mahasiswa (PUSDIMA), dan Gerakan Mahasiswa (Gema) Pembebasan yang merupakan sebuah strategi dakwah yang digelontorkan mereka dan banyak menysasar mahasiswa-mahasiswi baru yang masih dangkal pemahaman keagamaannya. Tidak jarang juga gerakan mereka ini massif dan melalui gerakan bawah tanah (*underground*) dalam menyemai ideologi mereka. Oleh karena itu, peran organisasi kemahasiswaan *mainstream* seperti PMII, HMI, dan IMM yang merupakan manifestasi dari dua organisasi arus utama yang moderat di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menjadi solusi yang tepat untuk dapat merapatkan barisan dan terus berupaya menanamkan nilai-nilai keislaman dan semangat nasionalisme kepada para kadernya agar tidak mudah terpengaruh dengan organisasi radikal yang kini sudah banyak meracuni pola pikir mahasiswa/mahasiswi (terdikalisasi atau telah di *brainwash*) dan berbaiat mendukung tegaknya sistem *khilafah Islamiyah* di Indonesia dengan dimulai dari kampus-kampus yang nantinya dapat menggulingkan sistem demokrasi dan mengganti Pancasila dengan khilafah transnasional yang setiap negara-negara Islam bergabung dengan satu orang pimpinan utama (*khalifah fil ard*) yang menyatukan seluruh negara Islam di seluruh dunia sebagaimana di zaman Nabi Muhammad Saw dan *khulafaur rasyidin*. Menurut saya, mereka “gagal paham”

³² Wawancara bersama informan berinisial AB, seorang Mahasiswa IAIN Samarinda pada tanggal 22 April 2019.

dalam mengartikan ayat-ayat Allah. Maka dari itu, penguatan organisasi kemahasiswaan di kampus merupakan keniscayaan dan bentuk kepedulian kita terhadap kedamaian negeri ini”.³³

Adapun menurut AH, untuk menangkal organisasi yang berafiliasi dengan organisasi transnasional radikal seperti HTI dan Ikhwanul Muslimin serta wahabi di kampus tentu perlu bagi seluruh organisasi mainstream (seperti PMII, HMI, dan IMM) untuk terus mendeklarasikan aksi penolakan terhadap organisasi terlarang yang ingin mendirikan *daulah Islamiyah* ini. Organisasi mainstream baik intra dan ekstra kampus sudah saatnya bergandengan tangan menutup rapat berbagai saluran-saluran ideologi organisasi radikal untuk masuk ke dunia kampus khususnya kampus Islam. Tentunya perlu adanya pengkaderan dengan melaksanakan latihan kepemimpinan dan deklarasi bela negara sebagai wujud nasionalisme kita sebagai generasi penerus bangsa yang akan memakmurkan negara ini. Maka dari itu, penguatan organisasi kemahasiswaan amat penting guna menjadi sebuah pondasi dalam menangkal radikalisme agama yang kini mulai bercokol di berbagai kampus Islam di Indonesia, tandasnya.³⁴

3. *Selektif dalam Rekrutmen SDM Unggul*

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) perlu melakukan seleksi penerimaan mahasiswa dan dosen agar aliran keagamaan mereka bisa difilter terlebih dahulu, bahkan kalau perlu mengajak mereka untuk mengikrarkan janji setia terhadap Pancasila sebagai wujud kecintaan terhadap agama dan negara ini.

FR menegaskan bahwa para pemimpin perguruan tinggi keagamaan Islam penting untuk memikirkannya derasnya arus radikalisme agama yang kini semakin subur di kampus-kampus Islam. Salah satunya adalah dengan melakukan seleksi terhadap ideologi mahasiswa dan dosen baru yang mereka bawa ke dalam kampus dengan melakukan berbagai wawancara intensif demi menggali pemahaman mereka yang tentunya dibutuhkan peran Psikolog Islam dalam mengetahui paham yang dibawa oleh masing-masing mahasiswa dan dosen yang kini akan bergabung dalam keluarga besar Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di seluruh Nusantara. Memang jika saya amati, banyak mahasiswa dan dosen baru terutama dosen yang memiliki riwayat pendidikan yang berasal dari luar negeri biasanya sudah terkontaminasi oleh berbagai paham keislaman, sehingga ketika terjadi proses pembelajaran pasti akan ada terselip indoktrinasi keagamaan yang mereka bawa semenjak kuliah yang terkadang

³³ Wawancara bersama informan berinisial FT, seorang Mahasiswa UIN Maliki Malang pada tanggal 25 April 2019.

³⁴ Wawancara bersama informan berinisial AH, seorang Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 24 April 2019.

ditransformasi tanpa adanya pertimbangan ideologi Pancasila, bahkan kritik pedas sering mereka lontarkan kepada sistem pemerintahan demokrasi Indonesia yang mereka katakan sebagai thogut yang banyak membuat rakyat menderita dan tidak memperoleh kesejahteraan. Hal ini kemudian menggiring opini mahasiswa/mahasiswi bahwa solusi dari krisis moralitas bangsa ini adalah dengan ditegakannya khilafah Islamiyah sehingga tercipta sebuah negara transnasional yang *baldatun, thaiyyibatun, warobbun ghofur*.³⁵

Sedangkan menurut BK, penerimaan mahasiswa dan dosen secara selektif perlu dilakukan. Mengingat di kampus tidak hanya terjadinya transformasi ilmu pengetahuan baik keislaman maupun umum tetapi juga media subur untuk menyemaikan ideologi dan kultur keagamaan yang sarat akan nilai-nilai. Nilai-nilai keislaman yang bercorak radikal ini tentu lebih terkesan eksklusif bahkan destruktif. Bahkan saya pernah mendapati seorang dosen yang ketika mengajarkan tentang keislaman terselip sebuah upaya pembangunan opini kekhilafahan sebagai solusi krisis moralitas yang kini mendera bangsa ini. Belum lagi, mengenai paham keagamaan yang diwariskan oleh senior terhadap juniornya dalam iklim organisasi yang hal ini juga sangat berbahaya bagi kampus Islam Indonesia yang lebih bercorak moderat dan inklusif. Sehingga upaya penyeleksian terhadap mahasiswa dan dosen baru itu amat penting, bahkan seharusnya ada sebuah rehabilitasi yang mungkin bisa dijadikan sebuah klinik nalar untuk membenahi berbagai ideologi yang cenderung kepada alur berpikir fundamentalis, eksklusif dan radikal.³⁶

4. *Menyediakan Literatur Keislaman dan Kebangsaan Inklusif-Multikultural*

Literatur bacaan keislaman yang kini merebak di dunia mahasiswa juga menjadi salah satu media *dakwah harakah jihadi* yang paling ampuh. Terlebih lagi di era milenial dengan kecanggihan teknologi ini semakin menguntungkan pihak organisasi radikal seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ikhwanul Muslimin (IM), dan berbagai gerakan *dakwah harakah jihadi* lainnya dalam menyemaikan benih-benih ideologinya guna meraih simpatisan dalam skala besar. Apalagi media bacaan berupa literatur keislaman kini mudah dan murah diakses dengan jaringan internet melalui buku bacaan digital yang sudah tersebar di berbagai website dan youtube, serta dipermudah lagi dengan berbagai aplikasi android dengan berbagai kemudahannya dalam mencari literatur keislaman yang marak beredar di media sosial yang notabenehnya menganut aliran pemikiran radikal seperti buku yang ditulis oleh salah satu militansi HTI yaitu Ustadz Felix Siaw, Anis Matta (Ikhwanul Muslimin), Salim A Fillah (Ikhwanul Muslimin), serta maraknya buku-buku bacaan yang

³⁵ Wawancara bersama informan berinisial FR, seorang Dosen UIN Maliki Malang pada tanggal 27 April 2019.

³⁶ Wawancara bersama informan berinisial BK, seorang mahasiswa IAIN Samarinda pada tanggal 23 April 2017.

bergenre wahabi kini membanjiri media sosial yang sering diakses oleh kaum muda muslim. Untuk itu, perlu adanya upaya dari para penulis moderat dari kalangan Nahdilyin (NU) dan Muhammadiyah untuk terus menelurkan karya-karya keislaman yang moderat agar bisa mengimbangi “perang ideologi literasi” yang kini sudah membanjiri media sosial terutama di kalangan milenial dewasa ini.

Literatur keislaman yang menjadi bahan bacaan dapat menjadi *blue print* diri seseorang. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap muatan indoktrinasi yang ditanamkan mereka kelompok radikalisme melalui buku-buku yang mereka tulis dan pasarkan di berbagai toko buku dan perpustakaan kampus. Tentunya sebagai seorang mahasiswa tidak hanya berperan sebagai pembaca dan penerima informasi, tetapi juga harus memiliki *sense of critical thinking*. Sehingga dengan adanya rasa berpikir kritis (*sense of critical thinking*) ini mampu mencerna secara baik berbagai redaksi yang ia baca, ketika ada narasi yang cenderung ada muatan politisasi agama yang masuk dalam tulisan tersebut yang tentunya saling membenturkan Islam dan ideologi Pancasila sebagai falsafah bangsa, hal ini mampu menjadi sebuah khazanah bacaan saja dan perlu melakukan berbagai pengkajian melalui berbagai literatur terutama mengenai sejarah berbagai organisasi Islam yang kini sedang marak di Indonesia seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ikhwanul Muslimin (IM), Wahabi (salafi) yang cenderung radikal dan ingin mengganti ideologi Pancasila dengan *khilafah Islamiyah*. Bagi mereka Pancasila dengan sistem demokrasi dan nasionalisme merupakan sistem Barat yang tidak bisa mengakomodir semua permasalahan umat. Bahkan sistem demokrasi merupakan *thogut* yang harus di rubah dengan sistem negara Islam (dawlah Islamiyah) sehingga tercipta kedamaian dan kesejahteraan serta keadilan di muka bumi ini. Maka dari itu, *sense of critical thinking* mahasiswa dalam melahap berbagai literatur keislaman harus mampu menjadikan mereka cerdas dalam memahami pergulatan geopolitik yang diciptakan oleh kelompok radikalisme melalui berbagai cara baik melalui media dakwah harakah jihadi menggunakan sistem kajian tarbiyah yang berbasis di masjid-masjid kampus maupun kajian-kajian melalui *hardbook* maupun *softbook* (ebook) melalui media sosial. Tentunya hal ini mesti menjadi perhatian bersama kalangan mahasiswa agar dapat membangun budaya literat yang kritis terhadap berbagai literatur keislaman generasi milenial yang semakin marak di media social.³⁷

5. *Membentuk Duta Damai Milenial di Media Sosial*

Peran pemuda (milenial) sangat penting dalam menangkal berbagai aksi gerakan radikalisme. Radikalisme atas nama agama ini terutama yang sudah banyak tersebar melalui media sosial, baik berupa ujaran kebencian (*hate speech*), hoax, dan berbagai macam fitnah yang dilancarkan kelompok radikal ini sudah sangat mengkhawatirkan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, perlu adanya upaya dari kalangan pemuda (mahasiswa) untuk dapat membentuk duta damai milenial di media sosial. Sehingga melalui pemuda, serangan indoktrinasi dilancarkan

³⁷ Wawancara bersama informan berinisial AN, seorang Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 24 April 2019.

oleh organisasi radikalisme ini dapat diketahui pergerakannya. Berhubung pengguna dominan media sosial mayoritas kalangan pemuda hal ini menjadi solusi ampuh menangkal berbagai serangan dakwah haraki jihadi yang mereka lakukan di media sosial dengan berbagai aktivitas memperbanyak narasi maupun video yang lebih positif tentang Islam dan kebangsaan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisah sebagai simbol persatuan umat.

Tentunya duta damai milenial di media sosial harus banyak bergerak sebagai media *counter* isu-isu romantisme agama yang dibangun oleh gerakan radikalisme. Media *counter* anti radikalisme ini bisa dengan membantu penyebaran ujaran kebaikan di media sosial baik berupa meme, tulisan essay, artikel, puisi, pantun, bahkan video dokumenter yang menggambarkan bahwa gerakan radikalisme seperti HTI, Ikhwanul Muslimin serta Wahabi merupakan gerakan yang dicekal dan tidak diterima di berbagai negara. Dengan adanya pembangunan opini seperti itu gerakan radikalisme ini tentu tidak akan leluasa melenggangkan sayap ideologinya.

Majunya perkembangan IPTEK merupakan udara baru bagi gerakan radikalisme dalam menyemaikan benih-benih ideologinya. Untuk mengantisipasi berbagai serangan gerakan radikalisme di media sosial, maka pada tahun 2017 melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme telah membentuk sebuah komunitas kaum muda yang dikenal dengan Duta Damai Milenial di Media Sosial yang tersebar di setiap provinsi di Indonesia yang disaring dari berbagai komunitas kepemudaan seperti pelajar, mahasiswa, akademisi yang terpilih melalui seleksi yang ketat dengan membuat proyek baik video atau tulisan yang bernuansa positif dan memiliki nilai filosofi. Hal ini sangat diapresiasi oleh para pemuda khususnya bagi saya pemuda Kaltim yang berkesempatan menjadi duta damai di media sosial dalam meredam dan menangkal berbagai bentuk ujaran kebencian (*hate speech*), hoax, dan fitnah yang kini marak terjadi. Belum lagi gerakan radikalisme yang kini sudah bertransformasi dalam mengemas indoktrinasinya melalui media sosial seperti website, youtube, facebook, instagram, twitter dan whatsapp semakin mempermudah akses mereka dalam melakukan perekrutan dan peneruan menggunakan narasi yang membangkitkan semangat keislaman yang tentunya dikemas sedemikian rupa dengan membenturkannya dengan sistem demokrasi Pancasila. Radikalisme media sosial ini justru lebih berbahaya karena target sasarannya jelas dan jangkauannya luas. Oleh karena itu, duta damai milenial di media sosial ini memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam menutup kran-kran persebaran ideologi radikal yang kini banyak di media sosial”.³⁸

DD mengatakan bahwa gerakan radikalisme kini sudah mengikuti kemajuan zaman. Di era teknologi informasi dewasa ini, pemuda merupakan sasaran target utama gerakan radikalisme seperti HTI, Ikhwanul Muslimin serta Wahabi dan afiliasinya dalam menebarkan konsep Tarbiyahnya. Apalagi pemuda yang notabene adalah pelajar dan mahasiswa merupakan pengguna media sosial aktif dan produktif.

³⁸ Wawancara bersama informan berinisial DD, seorang Mahasiswa IAIN Samarinda pada tanggal 22 April 2019.

Sehingga, gerakan radikalisme melalui media sosial merupakan strategi baru untuk dapat menyemaikan benih ideologinya. Dan terbukti banyak kalangan pemuda yang terjaring dalam ideologi tersebut, apalagi konten yang mereka bangun berkenaan dengan tema pemuda yang kini semakin viral di kalangan anak muda seperti tren hijrah busana yang lebih syar'i, hijaber, dan penggunaan celana cingkrak (isbal) yang kini tidak hanya menjadi pemandangan baru di Indonesia tetapi juga banyak ditiru oleh para artis korea. Tentu hal ini menjadi nilai tambah bagi tren mode yang mereka ciptakan untuk dapat membumikan konsep berpakaian Islami. Sehingga nuansa ikut-ikutan di kalangan anak muda kini menjadi tren bahkan para penjahit celana merubah bentuk celana menjadi cingkrak ala gaul yang marak digunakan kaula muda dewasa ini. Tidak hanya ideologi yang mereka dagangkan di media sosial tetapi juga simbol pakaian mereka. Hal ini jika dibiarkan akan sangat berbahaya dan akan mengganggu elektabilitas berbangsa dan bernegara. Untuk itu, dibentuknya duta damai milenial di media sosial menjadi alternatif yang tepat dalam mengatasi berbagai pengaruh buruk radikalisme atas nama agama ini menyebar luas secara bebas".³⁹

Sedangkan menurut MT, salah satu upaya meredam dan menangkal radikalisasi agama yang sedang marak di media sosial adalah dengan menciptakan duta damai milenial media sosial. Mengingat banyaknya pengguna media sosial yang berasal dari kalangan milenial baik pelajar maupun mahasiswa sehingga hal ini menjadi *cyber community* dalam menangkal berbagai paham keagamaan radikal yang kini massif di media sosial. Media sosial dewasa ini memiliki banyak manfaat bagi dakwah haraki tarbiyah untuk dapat menarik minat pemuda untuk dapat ikut serta dalam berbagai kajian-kajian keislaman yang mereka ciptakan. Untuk itu, dibentuknya duta damai milenial media sosial ini merupakan solusi konkret yang ditawarkan oleh pemerintah yang memberi tugas kepada para pemuda untuk dapat mengawal berbagai konten yang beredar di media sosial terutama tentang gerakan radikalisme yang hingga kini tidak pernah berhenti melakukan berbagai macam cara untuk menegakan *khilafah Islamiyah*".⁴⁰

E. Penutup

Berdasarkan rumusan masalah serta data hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Internalisasi Nilai-Nilai Keislaman dan Kebangsaan di IAIN Samarinda, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam mencegah dan menangkal berbagai bentuk radikalisasi agama di PTKI yaitu dengan melakukan langkah-langkah strategis yaitu: (1) melakukan penguatan wawasan keislaman dan kebangsaan melalui program pesantren kampus; (2) deradikalisasi melalui penguatan organisasi kemahasiswaan; (3) selektif dalam penerimaan mahasiswa dan dosen; (4) menyediakan literatur keislaman yang

³⁹ Wawancara bersama informan berinisial MT, seorang Mahasiswi UIN Maliki Malang pada tanggal 27 April 2019.

⁴⁰ Wawancara bersama informan berinisial TF, seorang Dosen UIN Maliki Malang pada tanggal 26 April 2019.

moderat, inklusif dan humanis, serta (5) membentuk duta damai milenial di media sosial.

Sebagai PTKI yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan juga nilai-nilai kebangsaan maka PTKI harus mampu menjadi pusat studi keislaman dan kebangsaan terutama dengan melakukan upaya-upaya strategis dan dinamis dalam penguatan pondasi keislaman dan kebangsaan dalam menghadapi gempuran kelompok-kelompok radikalisme yang saat ini sudah melakukan berbagai cara untuk menyemaikan ideologinya baik melalui media nyata maupun dunia maya (media sosial).

Untuk mengatasi sivitas akademika PTKI yang terkena dampak radikalisasi dan indoktrinasi mungkin bisa dibentuk sebuah “Klinik Nalar” dengan mengoptimalkan pusat studi keislaman dan kebangsaan dalam memperbaiki pola pikir orang yang teradikalisasi melalui rehabilitasi spiritual yang dapat dilakukan oleh beberapa pakar ahli seperti psikolog Islam, cendekiawan muslim, dan para kiyai yang fakih.

Untuk mahasiswa bisa dibentuk agen duta damai milenial media sosial untuk dapat melakukan upaya-upaya deradikalisasi di media sosial dengan banyak melakukan penyebaran berita-berita baik dan positif baik melalui tulisan, meme, maupun video yang menolak segala bentuk sikap dan perbuatan radikalisme maupun terorisme di dunia maya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi, *Islam Reformis: Dinamika Intelektual dan Gerakan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Bogdan, Robert, dan Biklen, SK, *Qualitative for Education : an Instruction to Theory and Methods*, Boston: Allyn and Bacon, Inc, 1982.
- Budiwanti, Erni, *Islam Sasak*, Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Hilmy, Masdar, “Geneologi dan Pengaruh Ideologi Jihadisme Negara Islam Iraq dan Suriah (NIIS) di Indonesia” dalam *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 4, No. 2, Desember 2014, hlm. 406. Lihat juga Muhammad Najih Arromadloni, “Kritik Pemahaman Hadith Negara Islam Iraq dan Suriah (NIIS)” dalam *Maraji: Jurnal Studi Islam*, Vol. 3, No.1, September 2016.
- Hutchinson, John, *Ethnicity and Modern nations Ethnic and Rasial Studies*, London: 2000.
- Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Noer, Deliar, *Pengantar Kepemikiran Politik*, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Nursisto, *Membumikan Pelajaran Agama Islam*, Yogyakarta: Adicita, 2008.
- Rais, Dhiauddin, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Sholehuddin, *Damai Beragama Damai Bernegara*, Tangerang Selatan: CV. Mutiara Barokah Multigrafika, 2018.

- Syam, Nur, "Deradikalisasi Agama Melalui Pendidikan", IAIN Sunan Ampel, dalam website: <http://nursyam.sunan-ampel.ac.id/?p=2566> (29 September 2018).
- Tasmara, Toto, *Menuju Muslim Kaffah, Menggali Potensi Diri*, Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Tilaar, H.A.R, *Mengindonesia: Entitas dan Identitas Bangsa Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- TIM ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education), Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: The Asia Foundation dan Prenada Media, 2003.
- Yatim, Badri, Soekarno, *Islam dan Nasionalisme*, 1999.
- Zuhri, Saefuddin, *Deradikalisasi Terorisme: Menimbang Perlawanan Muhammadiyah dan Loyalitas Nahdhatul Ulama*, Jakarta: Daulat Press, 2017.
- Wawancara bersama informan berinisial RK, seorang Mahasiswi IAIN Samarinda, pada tanggal 22 April 2019.
- Wawancara bersama informan berinisial PR, seorang Mahasiswa UIN Maliki Malang pada tanggal 26 April 2019.
- Wawancara bersama informan berinisial ZK, seorang Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 25 April 2019.
- Wawancara bersama informan berinisial AB, seorang Mahasiswa IAIN Samarinda pada tanggal 22 April 2019.
- Wawancara bersama informan berinisial FT, seorang Mahasiswa UIN Maliki Malang pada tanggal 25 April 2019.
- Wawancara bersama informan berinisial AH, seorang Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 24 April 2019.
- Wawancara bersama informan berinisial FR, seorang Dosen UIN Maliki Malang pada tanggal 27 April 2019.
- Wawancara bersama informan berinisial BK, seorang mahasiswa IAIN Samarinda pada tanggal 23 April 2017.
- Wawancara bersama informan berinisial AN, seorang Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 24 April 2019.
- Wawancara bersama informan berinisial DD, seorang Mahasiswa IAIN Samarinda pada tanggal 22 April 2019.
- Wawancara bersama informan berinisial MT, seorang Mahasiswi UIN Maliki Malang pada tanggal 27 April 2019.
- Wawancara bersama informan berinisial TF, seorang Dosen UIN Maliki Malang pada tanggal 26 April 2019.